

SKRIPSI

INNOVATION ORGANIZATION PADA PROGRAM ONE

AGENCY ONE INNOVATION DI DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun oleh :

LIDYA FARIANI

Nomor Stambuk : 105610522315



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

***INNOVATION ORGANIZATION PADA PROGRAM ONE AGENCY ONE
INNOVATION DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA***

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

LIDYA FARIANI

Nomor Stambuk : 105610522315

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

*** PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : *Innovation Organization* Pada Program *One Agency One Innovation* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
Nama Mahasiswa : Lidya Fariani
Nomor Induk : 105610522315
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mappamiring, M.Si



Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0055/FSP/A.4-II/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari jum'at tanggal 27 September 2019.




Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si


Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Drs. Alimuddin Said, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos M.Si


.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Lidya Fariani

Nomor Stambuk : 105610522315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 28 Juli 2019

Yang Menyatakan.



Lidya Fariani

ABSTRAK

Innovation Organization Pada Program One Agency One Innovation Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Mappamiring dan Ruliynawati Kasmad)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi organisasi yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Penentuan informan dilakukan secara purposive, adapun jumlah informannya sebanyak 9 orang. Teori yang digunakan adalah teori dari Mintzberg yaitu *Structure Simple, Machine bureaucracy, Professional bureaucracy, Divisionalized form, Adhocracy*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah *innovation organisation* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan baik tetapi pada bagian *adhocracynya* tidak dilakukan karena pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap kepada SKPD yang melakukan inovasi mampu mempertanggung jawabkan inovasi yang mereka buat.

Kata kunci : *Innovation Organization*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Rab al-jalil atas rahmat, raufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*innovation organization* pada program *one agency one innovation* di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw, atas jasa dan pengabdian-Nya yang tulus dalam menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada ummat manusia.

Sebelumnya ucapan banyak terima kasih dan penghargaan penuh cinta, penulis persembahkan kepada ayahanda **H.HALIM** dan ibunda **HJ.NUR LAELA** selaku orang tua kandung yang telah mengasuh, mendoakan, dan mendidik dengan penuh kesabaran dan pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini, tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA Ketua Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si. sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Saudara saya dan kaka sepupu saya yaitu Ns Nur Linda, S.Kep dan Jusniati, S.Pd yang membantu penulis dalam penelitian.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini, maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Makassar, 28 Juli 2019



Lidya Fariani

DAFTAR ISI

Halaman Peangajuan Skripsi.....	i
Halaman Peretujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Innovation Organization</i>	8
B. <i>One Agency One Innovation</i>	17
C. Penelitian Terdahulu	20
D. Kerangka Fikir	21
E. Fokus Penelitian	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Karakteristik Objek Penelitian33
B. *Innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba .52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan73
B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA78

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	21
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Inovasi Tahun 2017.....	51
Tabel 4. 2 Inovasi Taun 2018.....	51
Tabel 4.3 Inovasi Tahun 2019.....	51
Tabel 4.4 Jumlah pegawai.....	52
Tabel 4.5 Deskripsi Struktur Simple Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.....	54
Tabel 4.6 Deskripsi Proes Berdasarkan Aktifitas dan Strategi dalam Inovasi Organisasi dipemerintahan Kabupaten Bulukumba	59
Tabel 4.7 Deskripsi Propesional Birokrasi Berdasrkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.....	63
Tabel 4.8 Deskripsi Divisional Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.....	67
Tabel 4.9 Deskripsi Adhocracy Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Peta Letak Lokasi Bulukumba	34
Gambar 4.2 Struktur Orgaganisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Inovatif adalah sebuah organisasi yang menangkap dan memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh teknologi baru, pasar baru, dan cara-cara baru dalam menjalankan aktifitasnya. organisasi inovatif adalah pandangan baru tentang inovasi organisasi yang mempersiapkan para top manajer dan level-level lainnya untuk merangkul tantangan dan peluang menciptakan organisasi yang benar-benar *ambidextrous*, organisasi ini menyediakan alat bagi para top manajer untuk memanfaatkan trend dan peluang dari siklus inovasi yang cepat saat ini. (Berkely exsecutif education, 2019)

Inovasi adalah sumber pertumbuhan yang penting dan penentu utama keunggulan, kompetitif bagi banyak organisasi. Mencapai inovasi membutuhkan upaya terkoordinasi dari banyak aktor yang berbeda-beda dan intergritas kegiatan lintas sektoral, domain pengetahuan dan konteks aplikasi. Dengan demikian, pencapaian organisasi merupakan hal mendasar dalam proses inovasi.(Shalley Christina E,2015). Kemampuan organisasi untuk berinovasi adalah persyaratan keberhasilan pemanfaatan sumber daya intentif dan teknologi baru. Sebaliknya, pengenalan teknologi baru seringkali menghadirkan peluang dan tantangan yang kompleks bagi organisasi, yang mengarah pada perubahan praktik manajerial dan munculnya bentuk organisasi baru. Inovasi organisasi dan teknologi saling terkait.

(Schumpeter 1950) Melihat perubahan organisasi, di samping produk dan proses baru, serta pasar baru sebagai faktor penghancur kreatif. (Alice Lam, 2019).

Perubahan organisasi pemerintahan dalam hal ini pelayanan publik sekarang sedang menjadi salah satu fokus pemerintah baik pada tingkat pusat maupun sampai kegaris yang sangat dekat dengan masyarakat. Seperti halnya pada tahun-tahun yang lalu pelayanan publik di Indonesia dinilai sangat tidak baik, dengan hal ini, Inovasi sangat dibutuhkan agar pelayanan publik menjadi lebih baik, tepat sasaran, dan cepat. (Sartika Dewi, 2015).

Proses inovasi merupakan perubahan sebuah sistem yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan kearah yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan. Proses inovasi melihat bagaimana proses pembuatan inovasi dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada perbaikan pelayanan. Inovasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan sebagai bukti nyata dalam penerapan *One Agency One Innovation* (satu instansi satu inovasi) yang harus dilakukan oleh setiap instansi setiap tahun. Dengan program ini masyarakat sangat terbantu terutama dalam hal perbaikan pelayanan publik karena saat sekarang ini pelayanan publik sudah berbasis teknologi. (Basuki, 2018).

One Agency, One Innovation yaitu program yang menjadi keharusan pada setiap Provinsi, Kabupaten, Kota, pada Kementrian, Instansi, dan Pemerintah Daerah. Perubahan pelayanan publik sebagai jenis pelayanan publik baik berupa ide kreatif, gagasan yang sangat memberikan manfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, inovasi pelayanan

publik tidak harus selalu dengan ide-ide baru, penemuan baru. Melainkan pendekatan atau ancangan dengan karakter yang bersifat kontekstual baik berupa pelayanan publik yang sudah ada. (Modanggu, 2011)

Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai jenis inovasi disetiap penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga proses *good governance*, dapat tercapai. Dan peraturan Menteri PANRB Nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik “terombosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung”

Langkah perbaikan pelayanan publik di Indonesia dinilai masih lambat dan tidak dapat mengikuti ekspektasi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah dengan adanya kegiatan reformasi birokrasi maka secara cepat akan mengalami pengembangan kualitas berupa nilai dan mutu pelayanan publik dengan mengharuskan setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah menciptakan minimal satu inovasi pokok atau penting setiap tahun yang diketahui sebagai kegiatan *One Agency One Innovation*. Sebagai langkah terombosan (*breakthru*) melaksanakan percepatan pengembangan kualitas pelayanan publik. (Imanuddin, 2016)

One Agency, One Innovation adalah sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen *good governance*, *One Agency One Innovation* adalah kolaborasi tiga vilar bangsa yaitu pemerintah, masyarakat, pihak swasta dalam menciptakan sebuah inovasi yang harus dilakukan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah. minimal satu Inovasi untuk satu Instansi. (Modanggu, 2011). Hal ini bertujuan untuk acuan peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, satu lembaga atau organisasi harus selalu melakukan inovasi agar mampu bersaing dan mampu mengikuti perkembangan sekarang ini, cara untuk melakukan inovasi yaitu adanya ide-ide baru, keterlibatan di antara keduanya adalah kreativitas sebagai pengembangan ide baru. Sedangkan inovasi adalah penerapan ide-ide itu secara aktual ke dalam pelaksanaan atau implementasi dan kreativitas adalah interaksi antara kemampuan atau kapasitas seseorang dengan lingkungan. Agar kreativitas dapat berkembang di dalam organisasi maka harus mampu mendorong kreativitas gaya kepemimpinan yang meliputi pengumpulan keputusan partisipasi, kepemimpinan transformasional, dan mengembangkan kultur kreatif. (Idha Rahayuningsih, 2017)

Penelitian lainnya menjelaskan bahwa perubahan sering terjadi tetapi hanya mengikuti perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh organisasi lain. Hal ini tidak membawa dampak baik bagi organisasi tersebut. Desplaces (2005) menarik pendapat yang dilakukan Porras dan Robertson's (1992) perubahan yang ikutan memberikan dampak positif hanya sebesar 38%. Meskipun perubahan organisasi tidak langsung menghasilkan manfaat yang cukup banyak bagi peningkatan organisasi, akan tetapi kurang lebih praktisi tetap mempercayai

tentang bergunanya suatu organisasi untuk menjalankan perubahan. (Desplaces, 2005).

Dari pembahasan di atas peneliti ini akan mengukur faktor yang mempengaruhi inovasi, peneliti mencoba menggunakan teori Mintzberg *Innovative Organization* yang melihat pola dasar organisasi (*Organization archetype*) bagi *agency* yang melakukan inovasi yaitu : *Structure Simple, Machine bureaucracy, Professional bureaucracy, Divisionalized form, Adhocracy*. Dari dasar inilah maka penelitian ini mengangkat judul.

“Innovation Organization Pada Program One Agency One Innovation Dipemerintahan Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *structure simple* mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?
2. Apakah *machine bureaucracy* telah bekerja untuk mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?
3. Bagaimana *professional bureaucracy* dalam mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?
4. Bagaimanakah *divisionalized form* dalam mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?
5. Apakah terdapat lembaga *adhocracy* yang mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *structur simple* mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui *machine bureaucracy* telah bekerja untuk mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
3. Untuk mengetahui *divisionalized form* dalam mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
4. Untuk mengetahui *divisionalized form* dalam mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
5. Terdapat lembaga *adhocracy* yang mendukung *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pengetahuan untuk ke arah positif diharapkan menjadi tunas bangsa yang dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa bukan sebagai perusak, dan adanya perubahan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi Pemberi Pelayanan Publik : sebagai bahan masukan dalam rangka upaya menjalankan *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

- b. Bagi Masyarakat : penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat organisasi inovatif dalam perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba.
- c. Bagi Peneliti : merupakan pengalaman nyata untuk membantu penyelenggaraan *innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Innovation Organization

Organisasi inovatif adalah pandangan baru tentang inovasi perusahaan yang mempersiapkan para manajer dan pimpinan untuk merangkul tantangan dan peluang menciptakan perusahaan yang benar-benar *ambidextrous*, perusahaan yang mampu mengembangkan peluang wirausaha dan pelaksanaan yang sangat baik (baik kegiatan yang esensial namun berpotensi bertentangan). Satu organisasi akan berhasil itu tergantung dari seorang pemimpinnya bagaimana seorang pemimpin mendorong dan melakukan sebuah inovasi-inovasi baru. Perusahaan atau organisasi yang terus berinovasi akan menciptakan dan menemukan kembali pasar, produk, layanan, dan model bisnis baru, yang mengarah pada pertumbuhan yang lebih besar. Inovasi didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk mengenali peluang pasar, kemampuan internal untuk merespon secara inovatif.

Organisasi dapat mencapai keseimbangan di dalam struktur sosialnya jika hubungan yang mapan dapat berkembang, dengan ini pekerja dapat menyesuaikan keseimbangan diri yang terwujud. Dan apabila timbul perubahan dengan organisasi pekerja harus melakukan penyesuaian pada saat organisasi mencari keseimbangan baru, sebagai suatu siklus perubahan yang terus-menerus. Tugas seorang pemimpin salah satunya yaitu memperhatikan karyawan yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dengan melakukan hal-hal yang mengarah ke keseimbangan kelompok serta menata kembali pribadi-

pribadi para pekerja yang merasa terganggu oleh terjadinya perubahan. Dalam prinsip *homeostatis*, untuk menjaga keseimbangan, suatu kelompok dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik jika terjadi suatu perubahan, setiap tekanan pasti menimbulkan tekanan baik dari dalam kelompok. Oleh karena itu perlu mekanisme ketahanan “dari dalam” yaitu menghimpun energy apabila perubahan sebagai sumber ancaman maka keseimbangan perlu diperbaiki. Karakteristik organisasi yang memiliki mekanisme memperbaiki diri sendiri disebut *homeostatis*, yaitu para pelaku di dalam organisasi melakukan keadaan agar kebutuhan mereka terpenuhi, secara otomatis mereka melindungi diri dari kesemimbangan.

Para pemimpin yang melakukan perubahan dalam tim kerja atau organisasi perlu mempersiapkan diri dengan keterampilan dan harus memiliki dua hal, yaitu daya diagnosa dan kemampuan menerapkan perubahan. Daya diagnosa adalah menetapkan metode observasi untuk mengumpulkan data yang efektif serta menyusun cara mengelola dan menafsirkan data. Daya diagnosa adalah suatu kelincahan atau kepandaian untuk mengajukan pertanyaan, sensasi atau kepekaan terhadap lingkungan organisasi, menetapkan metode observasi dan pengumpulan data yang efektif serta menyusun cara mengolah dan menafsirkan data. (Afiff, 2012).

Dalam melakukan diagnosa, para pemimpin harus mengetahui perubahan apa yang diinginkan oleh organisasi, pemimpin harus mengetahui apa yang marak terjadi dan untuk menerapkan perubahan para pemimpin harus mampu mengerti dan betul-betul memahami data diagnose kedalam tujuan dan rencana, strategi dan

prosedur perubahan. Sebelum diagnosa dilakukan didalam organisasi maka harus ada penjelasan tentang situasi yang akan diamati, harus mengetahui dari sudut pandang banyak pihak yang akan terkena oleh dampak perubahan itu. Meskipun kadang kala realitas itu menghambat perspektif luas, sehingga harus dipahami benar kerangka acuan itu yang kita gunakan sejak awal. Dengan identifikasi masalah, maka sejauh mana kita dapat mendeteksi kesenjangan antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang diinginkan untuk terjadi. Sebagaimana yang diketahui pada suatu perubahan dilakukan untuk memperkecil kesenjangan antara kenyataan (aktual) dengan apa yang diinginkan (ideal). Bisa jadi setelah kita melakukan diagnosa, barulah disadari bahwa keinginan kita selama ini tidak realistis karena perlu keseimbangan dengan hal-hal yang sesungguhnya terjadi. (Afiff, 2012).

Dengan adanya perubahan, maka perlu diidentifikasi alternatif pemecahan dan strategi penerapan yang tepat untuk mengurangi kesenjangan. maka perlu antisipasi konsekuensi yang akan muncul dari penerapan masing-masing strategi alternatif, dan pada akhirnya perlu memilih strategi spesifik yang cocok untuk diterapkan, bersamaan dengan penentuan alternatif dan pemecahan masalah. Sebelum melakukan satu strategi perubahan maka ditentukan hal-hal apa saja yang perlu kita miliki (sebagai faktor pendukung) untuk melakukan upaya perubahan dan hal-hal apa yang merintanginya (sebagai faktor penghambat). Berdasarkan pengalaman, bahwa apabila pemimpin melakukan strategi perubahan tidak melakukan langkah analisis terlebih dahulu, bukan tidak mungkin akan menemukan kesulitan dan tidak mengetahui penyebabnya. Untuk memanfaatkan

teknik analisis didalam menyusun strategi perubahan, ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan. Pertama, apabila didalam frekuensi faktor pendukung jauh melebihi faktor penghambat dalam situasi perubahan, maka pemimpin dapat melakukan atau mengatasi faktor penghambat untuk mendorong terjadinya perubahan yang diinginkan. Kedua, begitupun sebaliknya apabila dimana faktor penghambat jauh lebih kuat dari pada faktor pendukung. maka pemimpin akan dihadapkan beberapa pilihan, untuk menghentikan upaya perubahan dengan menyadari akan kesulitan jika hal tersebut dipaksakan, atau mengubah setiap faktor penghambat satu demi satu menjadi faktor pendukung dengan tetap mempertahankan kekuatan faktor-faktor pendukung. Ketiga, apabila faktor pendukung dan faktor penghambat memiliki kekuatan yang sama, para pemimpin dapat lebih mempertahankan faktor pendukung, sekaligus pada saat yang sama mengubah dan memperkecil kekuatan, baik sebagian atau seluruh faktor penghambat. (Afiff, 2012).

Dengan demikian perubahan tetap bisa dilakukan dengan mengkaji dua daur perubahan yang berbeda. Pertama, daur perubahan partisipatif, adalah apabila telah tersedia pengetahuan yang kondusif dari tim kerja dan organisasi untuk menerima perubahan, maka sikap dan sinerjitas positif dapat diarahkan ke perubahan yang diinginkan. Strategi yang efektif yaitu dengan melibatkan setiap individu, tim kerja atau organisasi secara langsung dalam upaya membantu dan memilih ataupun melembagakan metode-metode baru dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan ikut serta dalam memecahkan permasalahan. Dengan melakukan itu semua, yang memungkinkan kita mengubah suatu organisasi

menjadi inovatif. Organisasi inovatif yang kita inginkan dapat terwujud, jika adanya kemauan keras dari semua kalangan *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, yang aktif maupun pasif. (Afiff, 2012).

Menurut Mintzberg, ada lima Organization archetype yang dapat dijadikan indikator yaitu:

1. *Structure Simple*, (struktur sederhana) ini sebagai bagian utama puncak strategis, menggunakan pengawasan langsung dan mempekerjakan sentralisasi vertikal dan horizontal, dan organisasi ini dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan cepat. Dan menekankan inovasi serta kelangsungan hidup jangka panjang.
2. *Machine bureaucracy*, (mesin birokrasi) memiliki struktur teknologi sebagai bagian utama, menggunakan standarisasi proses kerja sebagai mekanisme koordinasi utamanya, dan menggunakan desentralisasi horizontal terbatas. Mesin birokrasi ini juga memiliki tingkat formalisasi dan spesialisasi kerja yang tinggi.
3. *Professional bureaucracy*, (birokrasi profesional) memiliki inti operasi sebagai bagian kuncinya, menggunakan standarisasi keterampilan sebagai mekanisme koordinasi utamanya, dan menggunakan desentralisasi vertikal dan horizontal.
4. *Divisionalized form*, (formulasi pembagian) devisi ini membentuk garis tengah sebagai bagian kuncinya, dan menggunakan standarisasi output sebagai mekanisme koordinasi utama, dan menggunakan desentralisasi vertikal terbatas.

5. *Adhocracy* (adhokrasi) memiliki staf pendukung sebagai bagian kuncinya, menggunakan penyesuaian timbal balik sebagai sarana koordinasi.

Inovasi menjadi lebih penting karena perubahan lingkungan semakin cepat, pendapat Lawrence dan Lorsch bahwa struktur organik dan mekanis dapat hidup berdampingan tercermin dalam debat kontemporer tentang pentingnya mengembangkan mode hibrid organisasi *ambidextrous*, organisasi yang mampu mengatasi perubahan teknologi evolusioner dan revolusioner (O'reilly dan Tushman, 2004). kontribusi awal penting lainnya adalah karya (Mintzberg, 1979). yang mensintesis banyak pekerjaan pada struktur organisasi yang mengusulkan serangkaian arketipe yang menyediakan konfigurasi struktur dasar perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang berbeda. Sejalan dengan teori kontingensi, ia berpendapat bahwa organisasi yang sukses merancang strukturnya agar sesuai dengan situasinya. Selain itu, mengembangkan konfigurasi logis dari parameter desain. Dengan kata lain, penataan yang efektif membutuhkan konsistensi parameter desain dan faktor kontingensi. Itu 166 "hipotesis konfigurasi" menunjukkan bahwa perusahaan cenderung didominasi oleh salah satu dari lima arketipe murni yang diidentifikasi oleh Mintzberg, masing-masing dengan potensi inovatif yang berbeda: *struktur sederhana*, *birokrasi mesin*, *birokrasi profesional*, *formulir yang dibagi* dan *adhokrasi*. (Alice Lam, 2011).

Dua dari arketipe ini dapat digolongkan sebagai organisasi organik dengan kapasitas tinggi untuk inovasi dan adaptasi: struktur sederhana dan *adhokrasi*. Yang pertama bergantung pada pengawasan langsung oleh satu orang, seperti

dalam kasus kewirausahaan start-up, yang terus-menerus mencari lingkungan berisiko tinggi. Yang terakhir adalah organisasi berbasis proyek yang sangat fleksibel dan mengandalkan penyesuaian tim penyelesaian masalah bersama. Ia mampu melakukan inovasi radikal dalam lingkungan yang bergejolak. Tiga arketipe lainnya yang tersisa, birokrasi mesin, birokrasi profesional, dan bentuk yang terbagi lebih banyak dihambat dalam kemampuan inovatif mereka yang kurang mampu menghadapi hal-hal baru dan perubahan. Mereka berasumsi bahwa ketika pasar teknologi dan produk menjadi lebih kompleks dan tidak pasti, kegiatan tugas lebih heterogen dan tidak dapat diprediksi, organisasi akan mengadopsi struktur yang lebih adaptif dan fleksibel, dan mereka akan melakukannya dengan beralih dari bentuk pengorganisasian birokratis ke organik. (Alice Lam, 2011).

Pelayanan yang lambat, berbelit-belit, kurang profesional, kurang responsive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan satu penyakit pelayanan publik di Indonesia dalam melayani masyarakat. Untuk itu diperlukan perbaikan atau inovasi baru agar tercipta suatu pelayanan yang baik dan maksimal. (Mahsyar, 2011).

Berikut ada beberapa kepekaan organisasi terhadap inovasi dan pengambilan keputusan sebelum melakukan inovasi:

1. Kepekaan Organisasi terhadap Inovasi

Kepekaan disini adalah berhubungan dengan sejauh mana organisasi itu peka terhadap inovasi (lebih cepat menerima inovasi).

Berikut beberapa variabel yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi, yaitu :

- a. Ukuran suatu organisasi. Semakin besar suatu organisasi maka semakin cepat menerima satu inovasi.
- b. Mencakup Karakteristik struktur organisasi.
- c. Sentralisasi. Dalam organisasi kewenangan dan kekuasaan dikendalikan oleh orang-orang tertentu, hal ini terdapat hubungan negatif dengan kepekaan organisasi.
- d. Kompleksitas. Artinya organisasi berdiri karena orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Hal ini terdapat hubungan yang positif terhadap kepekaan organisasi.
- e. Formalitas. Artinya satu organisasi harus berpacu pada prosedur dan aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Hal ini memiliki hubungan negatif terhadap kepekaan organisasi.
- f. Keakrabah dengan anggota. Ini juga mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi.
- g. Kelenturan organisasi. Artinya sebesar apapun organisasi mau menerima masukan-masukan dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Hal itu memiliki hubungan positif terhadap kepekaan organisasi.
- h. Karakteristik perorangan (pemimpin). Ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang terbuka pada satu inovasi maka semakin cepat organisasi itu menerima.

- i. Karakteristik eksternal organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan sistem yang dianut oleh organisasi. Apabila organisasi mau menerima pengaruh dari luar sistem, maka organisasi tersebut akan cepat menerima satu inovasi.

2. Keputusan Organisasi dalam Inovasi

Suatu Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting. Karena dampak dari pemilihan keputusan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan perorganisasian tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat pasti berpengaruh positif ke organisasi tersebut, sebaliknya jika pengambilan keputusan salah, maka justru akan merugikan organisasi itu. (Ibrahim,1988).

Sebelum melakukan sebuah inovasi perlu ada pengambilan keputusan, berikut beberapa macam keputusan organisasi sebelum melakukan inovasi:

1. Keputusan Otoritas

Keputusan ini dibuat oleh seseorang dan sekelompok kecil orang-orang yang sering disebut sebagai “kelompok dominan” didalam satu organisasi. Dengan hal tersebut keputusan untuk menerima atau menolak inovasi dipaksakan kepada anggota organisasi oleh para petinggi organisasi (orang yang mempunyai kekuasaan). Berikut Ada dua macam tipe keputusan otoritas yang sering digunakan dalam organisasi formal :

- a. Keputusan otoritas dengan partisipasi anggota organisasi (pendekatan partisipatif).

- b. Keputusan otoritas tanpa partisipasi anggota organisasi (pendekatan otoritatif).

2. Keputusan Kolektif

Menurut Rogers dan Soemakar (1971) keputusan kolektif sebagai salah satu cara yang digunakan oleh para anggota sistem sosial untuk menolak atau menerima inovasi sebagai kesepakatan bersama dan semua anggota harus menerima keputusan yang telah dibuat bersama. Keputusan kolektif bisa digunakan oleh organisasi yang dibentuk secara sukarela. Misalnya organisasi kesenian dan olahraga. Menurut Scheni, ada dua hal yang menghambat dilaksanakannya pengambilan keputusan yaitu:

- a. Anggota minoritas membutuhkan waktu yang sedikit lama karena seringkali merasa tidak cukup waktu pada saat membicarakan hal-hal yang dipertanyakan tersebut, sehingga mereka belum mengetahui secara mendalam.
- b. Kelompok minoritas berpendapat bahwa didalam pengumpulan suara itu terjadi dua kelompok yang bersaing, pada saat sekarang ini mereka kalah dan mereka akan menunggu kesempatan untuk berjuang mendapatkan keberhasilan pada pengumpulan suara diwaktu yang akan datang.

B. One Agency One Innovation

Program *One Agency One Innovation* merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Joko Widodo bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Langkah-langkah dalam memperbaiki pelayanan publik di Indonesia dinilai masih

tertinggal dan tidak dapat mengikuti ekspektasi masyarakat yang selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi melaksanakan kebijakan yang mendorong percepatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengharuskan pada setiap Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah menciptakan paling sedikit satu inovasi yang utama setiap tahunnya yang dikenal dengan gerakan *One Agency One Innovation*. (Imanuddin, 2016)

Gerakan *One Agency One Innovation* ini menjadi gerakan bersama untuk suatu kerangka kebijakan yang harus dipahami bersama pula oleh semua komponen *Good Governance*. Telaah keilmuan harus menjelaskan konsep *One Agency One Innovation* dari sisi pengembangan Ilmu Administrasi Publik. (Imanuddin, 2016).

Mengembangkan bentuk *One Agency One Innovation* dari upaya untuk melakukan perubahan serta pembaharuan dalam pemerintahan atau bisa disebut dengan reformasi birokrasi. Perubahan dalam reformasi birokrasi sangat dirasakan oleh masyarakat yang menginginkan reformasi tersebut berjalan dengan cepat namun kenyataannya kemajuan pelayanan publik tersebut berjalan dengan lambat, Menurut Tempo dalam penelitiannya terdapat 18% warga atau masyarakat yang berpendapat bahwa pelayanannya sudah lebih baik, 24% berpendapat bahwa perizinan untuk usaha sudah lebih mudah dan 10% masyarakat yang berpendapat bahwa proses penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang sudah bagus.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh pelayanan publik yang berjalan dengan lambat yang ditinjau terhadap persoalan birokrasi pemerintahan, disebabkan birokrasi pemerintahan merupakan pelaksana setiap keputusan politik maupun pemerintahan di Indonesia. Birokrasi sering dimaknai sebagai proses pelaksanaan pelayanan yang sangat sulit berbelit, tidak disiplin, banyaknya penyuapan serta pendapatan negatif lainnya. (Imanuddin,2016)

Maka dari itu mempercepat peningkatan kualitas dalam pelayanan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mempercepat meningkatnya mutu yang bagus dalam pelayanan publik secara normal atau bisa disebut dengan mempercepat peningkatan mutu yang balik dalam pelayanan publik supaya peningkatan kecepatan untuk pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pelaksanaan peningkatan mutu yang baik dalam pelayanan publik dikatakan baik apabila sudah menyangkut dengan perubahan yang bertahap yang di lakukan secara keseluruhan, seperti meningkatkan mutu kenyamanan dari yang tidak nyaman menjadi nyaman, sedangkan dalam melakukan percepatan pelaksanaan pelayanan publik merupakan perubahan yang bertahap dalam menyelenggarakan pelayanan publik, seperti pelayanan publik yang dilakukan secara manual menjadi pelayanan publik yang lebih modern yang dapat memberikan perubahan dalam instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik. (Imanuddin, 2016)

Maka dari itu, pelayanan publik dalam menginovasi pelayanan publik untuk mempercepat peningkatan mutu yang baik yang dijadikan sebagai penerak

perubahan serta memberikan dorongan dalam perubahan sehingga membuat pelayanan publik menjadi perubahan yang bertahap dengan baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

One Agency One Innovation merupakan langkah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik. Kemudian dikembangkan melalui Ilmu Administrasi Publik dan menggunakan konsep inovasi dan pelayanan publik *On Agency One Innovation* sebagai langkah selanjutnya dari berbagai cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah, contohnya memperbaiki regulasi pelayanan, sumber daya manusia aparatur pelayanan, dan proses dan mekanisme pelayanan. hingga saat ini masih dinilai jauh dari kata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. *One Agency One Innovation* menjadi sebuah langkah dalam melakukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong timbulnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan. (Imanuddin, 2016)

Inovasi daerah sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yaitu menjamin setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses *good governance*. Yang menghasilkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel beriku:

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan

No	Nama	Thn	Judul Penelitian	Tujuan
1.	Sophie florence	2018	INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi tentang <i>Surabaya intelligent transport system</i> dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di dinas perhubungan kota surabaya)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan layanan inovasi sistem transportasi cerdas Surabaya dan kualitas layanan di dinas perhubungan Surabaya dengan menggunakan lima atribut inovasi dan empat dimensi layanan kualitas.
2.	Abdul Azis Wahab	2015	KEPEMIMPINAN DALAM PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI	Bertujuan untuk mengelola kreatifitas dan inovasi (managing creativity and innovation) dan menjadi seorang pemimpin yang inovatif (innovative leader).
3.	Botani square	2018	IPB <i>innovation & entrepreneurship expo</i>	Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan daya saning bangsa, pengembangan model kewirausahaan berbasis teknologi dan social (<i>techno-socio-entrepreneurship</i>) di IPB menyediakan dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang mapan termasuk yang melibatkannya mendukung yang mendukung.

Sumber: Dikumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian ini mencoba menggunakan pola dasar

Organization archetype Mintzberg yang melihat dari *Structure Simple*, *Machine bureaucracy*, *Professional bureaucracy*, *Divisionalized form*, *Adhocracy*.

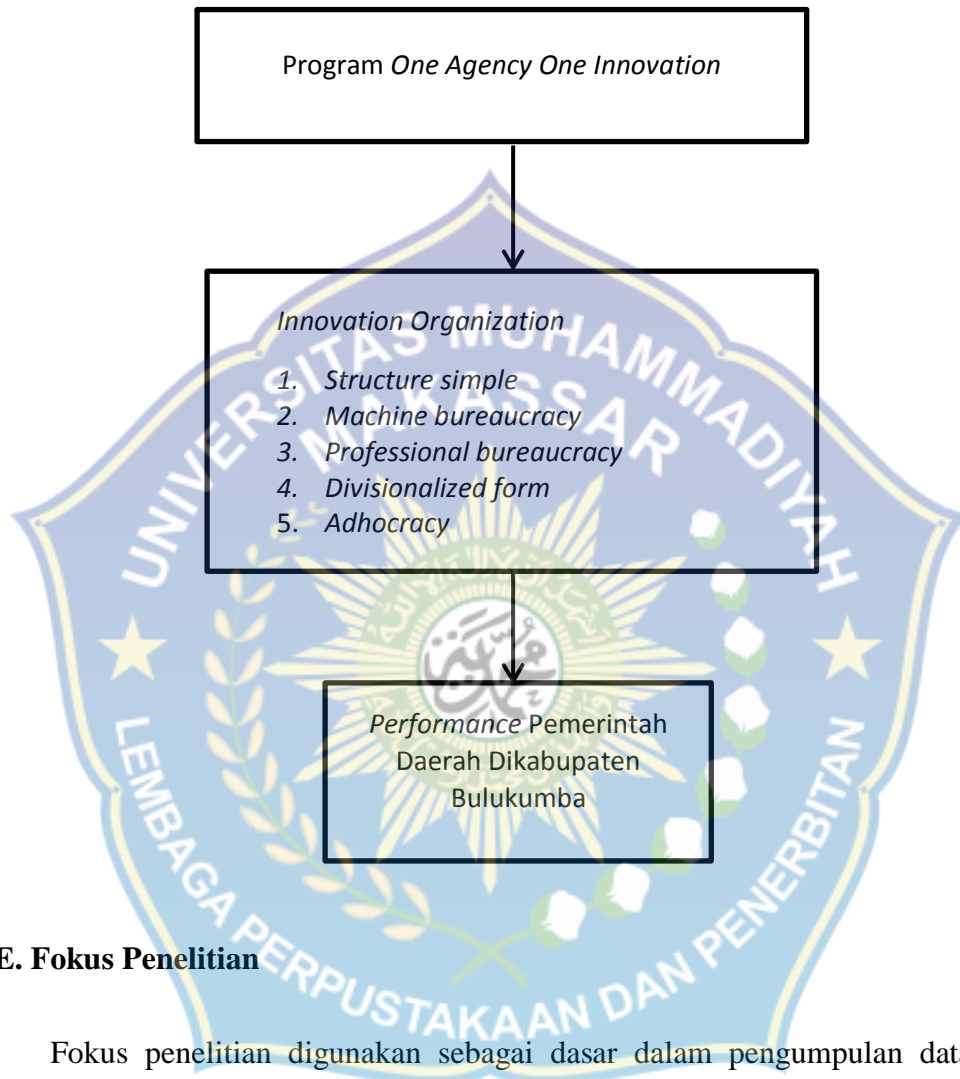
D. Kerangka Fikir

Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan program *One Agency One Innovation*. Tujuan dari program ini untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publik, karena selama ini Langkah perbaikan pelayanan publik di Indonesia maupun di kabupaten Bulukumba sendiri dinilai masih lambat dan tidak bisa mengikuti ekspektasi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi Informasi. Inovasi pada era sekarang ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana program *One Agency One Innovation* dipemerintahan Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan pola dasar Organization archetype Mintzberg. yaitu : *Structure Simple*, *Machine bureaucracy*, *Professional bureaucracy*, *Divisionalized form*, *Adhocracy*.

Adapun bagan kerangka fikir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data yang diambil. Untuk menyamakan pembahasan dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu *Organization archetype* Mintzberg, yaitu : *Structure Simple, Machine bureaucracy, Professional bureaucracy, Divisionalized form, Adhocracy*.

1. *Structure Simple*, struktur simple ini sebagai awal sebelum melakukan suatu inovasi, struktur sederhana ini digunakan oleh pemerintah atau pun perusahaan untuk melakukan sebuah inovasi, struktur ini dibuat tergantung bagaimana seorang pemerintah atau organisasi agar tidak menyulitkan para karyawan atau pegawainya agar suatu inovasi dapat berjalan dengan baik.
2. *Machine bureaucracy*, yang berperan pada mesin birokrasi ini yaitu para karyawan atau anggota di suatu organisasi ataupun pemerintahan untuk melakukan sebuah inovasi baru.
3. *Professional bureaucracy*, pada bagian ini sangat terkait dengan strukture simple dan mesin birokrasi. Para karyawan atau anggota organisasi bekerja dengan melihat standar-standar simple, dan bekerja secara professional tidak menerima masukan-masukan di luar struktur atau standar yang telah ditentukan sebelumnya, agar inovasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan dari awal.
4. *Divisionalized form*, organisasi besar dengan prodak membuat divisi untuk menangani kegiatan terkait. Keuntungan dari struktur organisasi yang terbagi ini adalah bahwa divisi tersebut dapat bertindak dengan otonomi tingkat tinggi untuk menangani situasi khusus mereka.
5. *Adhocracy*, Adhokrasi memiliki staf atau standar pendukung sebagai bagian kuncinya, menggunakan penyesuaian timbal balik sebagai sarana koordinasi, dan mempertahankan pola selektif desentralisasi. (menggunakan penyesuaian timbal balik sebagai sarana koordinasi, dan mempertahankan yang sudah ada).

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas, maka biasa dikemukakan deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. *Structure Simple*, yang dimaksud sini adalah bagaimana para pekerja melakukan sebuah inovasi yang berpedoman pada struktur yang telah dibuat agar satu inovasi dapat berjalan dengan baik. Struktire ini didesain atau di diskusikan secara formal agar struktire ini tidak menghambat jalanya semubah inovasi.
2. *Machine bureaucracy*, yang dimaksud dengan mesin birokrasi disini adalah para aparat pemerintahan yang bekerja sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing tetapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk sebuah inovasi.
3. *Professional bureaucracy*, profesional birokrasi yaitu organisasi yang betul-betul bekerja secara professional, yang tidak lagi bekerja dengan sogokan-sogokan, yang betul-betul bekerja sesuai tuntutannya.
4. *Divisionalized form*, satu organisasi dalam melakukan satu inovasi membutuhkan divisi untuk menangani inovasi tersebut, divisi ini dapat bertindak sesuai dengan standar struktire birokrasi dan melakukan secara professional.
5. *Adhocracy*, suatu organisasi ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan satu inovasi, adhokrasi ini membutuhkan tim atau standar pelayanan untuk melakukan sebuah inovasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Ada dua Dinas atau Instansi yang melakukan program *One Agency One Innovation* adalah di Dinas kesehatan dan Dinas Capil yang masuk empat puluh (40) besar inovasi di Indonesia, penelitian ini memilih Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Karena inovasi-inovasi yang dilakukan pada Dinas Kesehatan yang banyak mendapatkan respon baik dari masyarakat dan pemerintah setempat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. (Sugiono. 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggara pelayanan yang sesuai dengan program *One Agency One Innovation*.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif (sugiono, 2014). Deskriptif kualitatif mencoba menggambarkan bagaimana program *One Agency One Innovation*. Berjalan di Dinas Kesehatan di Kabupaten Bulukumba

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data primer

Merupakan data atau informasi yang di dapatkan secara langsung dilapangan melalui dokumen-dokumen,wawancara secara langsung dengan instansi atau pemerintah setempat yang bisa menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan langsung tentang perubahan-perubahan yang terjadi di daerah tersebut (Sugiono,2013).

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berdasarkan literature, peraturan-peraturan, teori, dokumen, dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian (Sugiono,2013).

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling penting (*urgen*) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang tepat.

Adapun informan yang terdapat dalam peneletian ini yaitu:

Table 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba	1 orang
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba	1 orang
3.	Kabid Binyankes	1 orang
4.	Kasubag umum dan Kepegawaian	1 orang
5.	Ketua Koordinasi Harian PSC (salah satu inovasi)	1 orang
6.	Pelaksana inovasi (karyawan PSC)	2 orang
7.	Masyarakat	2 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara operasional yang ditempu oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu penelitian bergantung oleh data objektif. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai alat pengambilan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang diperlukan adalah:

1. Observasi

Pada metode pengamatan ini Penelitian melakukan observasi atau pengamatan secara langsung kelokasi penelitian langsung, jenis penelitian ini juga dilakukan secara buka-bukaan tentang kegiatan yang berkaitan dengan program *One Agency One Innovation* dikabupaten Bulukumba.

2. Wawancara

Wawancara adalah Proses tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari informan-informan yang terkait tentang program *One Agency One Innovation* yang dilakukan di kabupaten Bulukumba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui cara pengumpulan data melalui sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah perubahan-perubahan yang terjadi dikabupaten Bulukumba. Dokumentasi bias berupa tulisan ataupun berita dari media online, arsip-arsip tulisan dari Dinas terkait untuk membantu penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah berikutnya untuk mengelola data dimana data yang dipergunakan dikerja dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian.

Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2014) tiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Kata

Jumlah data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, untuk itu harus dicatat secara jelas. Oleh karena itu diperlukan secara berlanjut menganalisis data melalui reduksi data. Reduksi data melalui cara merangkum atau menyimpulkan dengan cara memilih hal yang penting dan terkait dengan pokok penelitian tersebut.

2. Penyajian data

Penyajian data diolah dengan menyusun dan menyajikan ke dalam teks naratif yang sesuai dengan keadaan data yang telah direduksi, akan memudahkan pengkonstruksian data dilakukan yang ditemukan dalam penelitian ini akan tetap dalam konteks fokus penelitian dan tidak meluas keluar tema. Data yang diambil dari hasil pengamatan lapangan serta hasil wawancara dengan informan dan telah diolah melalui proses reduksi, penyusunan, diseleksi dan dikategorisasikan kemudian disajikan dalam bentuk teks seperti *innovation organization* pada program *one agency one innovation* dipemerintahan Kabupaten Bulukumba. Lalu pola-pola variasi hasil penelitian muncul di lapangan sehingga semua data yang diharapkan dapat diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dilaksanakan aktifitasnya pada saat pengumpulan

data sudah cukup dan selesai. Langkah ini berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang matang apabila kesimpulan dirasakan kurang lengkap, maka akan dilakukan pengumpulan data kembali dilapangan, sasaran yang sudah focus. Penelitian melakukan uji kebenaran terhadap setiap makna yang muncul dari data, melalui pengecekan ulang kepada informan pendukung terhadap setiap data yang didapat selain itu peneliti melakukan diskusi terhadap interpretasi pada pihak-pihak lain baik yang ada dilapangan maupun diluar lapangan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai *innovation organization* pada program *one agency one innovation* dipemerintahan Kabupaten Bulukumba.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Triangulasi menurut (Sugiyono, 2013). Diartikan sebagai pengecekan ulang data melalui berbagai sumber dari berbagai tahap dan berbagai waktu. Lebih lanjut lagi Sugiono membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dengan beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan menguji data yang telah didapatkan dengan hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti

membandingkan hasil pengamatan dengan melakukan perbandingan dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap dokumen yang ada.

2. Triagulasi teknik

Triagulasi teknik dengan cara mencocokkan data melalui sumber yang sama atau dengan cara yang berlainan atau berbeda. Dengan ini yang diperoleh dengan wawancara lalu dilihat dengan observasi dan dokumen. Apabila ketiga teknik yang dilakukan melalui pengujian kredibilitas data tersebut mendapatkan data yang tidak sama, maka peneliti harus lebih lanjut melakukan diskusi untuk mengambil keputusan mengenai sumber data yang terkait, dalam memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triagulasi waktu

Waktu juga bias mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melalui pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dengan waktu dan kondisi yang tidak sama. Jika hasil pengujian memperoleh data yang tidak sama atau berbeda, maka harus dilakukan dengan berulang-ulang sehingga dapat ditemukan kepastian datanya. Triagulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim penelitian lain yang diberikan tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba Adalah Salah Satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km². Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,47 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara Geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antar 5°20'' sampai 5°40'' Lintang Selatan dan 119°50'' sampai 120°28'' Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Teluk Bone
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Berikut gambar letak kabupaten bulukumba:



Gambar 4.1: Peta Letak Lokasi Bulukumba

Secara Wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng/Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan

Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah *alluvial hidromorf* coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

2. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Dinas Kesehatan (dinkes) daerah atau wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan merupakan instansi yang bertanggung jawab mengenai kesehatan. Dinkes Kabupaten Bulukumba memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan.

Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor dinas kesehatan ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya. Kunjungi kantor dinas kesehatan terdekat ini untuk aduan atau informasi seperti info kesehatan, program kesehatan, hingga berita kebijakan kesehatan. Anda juga dapat mengunjungi situs atau website resmi dinkes secara online untuk informasi lainnya.

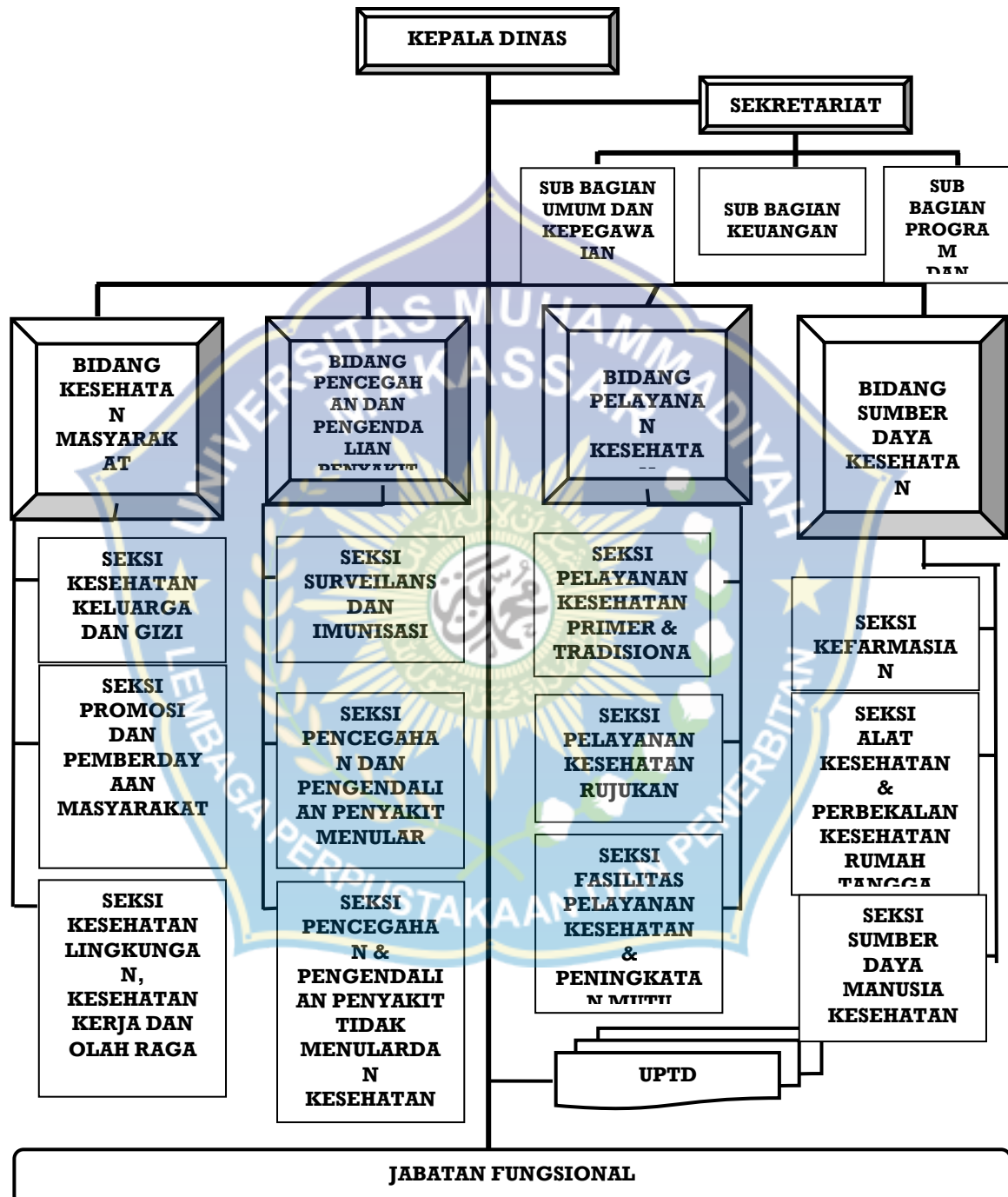
Adapun visi dinas kesehatan yaitu :

"Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius" sedangkan **Misi dinas kesehatan :**

1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat;

a) **Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2019**

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas kesehatan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Uraian tugas Kepala Dinas yaitu:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan Dinas Kesehatan;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan umum pembangunan kesehatan, meliputi tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sertatugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan teknis pembangunan kesehatan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan berdasarkan kebijakan upaya kesehatan berdasarkan kebijakan tehnis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis, administratif upaya-upaya pembangunan kesehatan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- 7) Menyelenggarakan pembinaan oprasional dibidang kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

- 8) Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Kesehatan;
- 9) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- 11) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program di lingkup Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- 2) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dilingkungan Dinas Kesehatan;
- 3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- 4) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan keitan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
- 5) Memberi petunjuk pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Dinas Kesehatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas sehingga terwujud koordinasi, sikronisasi dan intergrasi pelaksanaan kegitan;
- 7) Memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan barang milik Negara;
- 8) Memberi petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 9) Memberi petunjuk dan mengevaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan;
- 10) Mengoordinasikan dan melaksankana pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- 11) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- 12) Melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan perangka hukum, administrasi kepegawaian dan administrasi
- 13) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan barang milik Negara (BMN);
- 14) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas Kesehatan;

15) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Kesehatan;

16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atas; dan

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atas sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.

b. Sub bagian keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan kegiatan serta membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan lingkup Dinas Kesehatan.

c. Sub bagian perencanaan dan pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
- 4) Merencanakan program lima tahunan upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan mengendalikan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpecil, rawan dan kepulauan
- 6) Melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.
- 7) Melakukan pembinaan teknis dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga dan gizi.
- 8) Menyusun profil upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
- 9) Melakukan koordinasi lintas program dan sektor termasuk lembaga internasional sesuai dengan bidang tugasnya

- 10) Melaksanakan evaluasi pengembangan program upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
 - 11) Melaksanakan kemitraan dalam pembinaan upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
 - 12) Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan teknis upaya pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi
 - 13) Melakukan analisis data dalam rangka pengembangan program upaya pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
 - 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
 - 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi di pimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi.

e. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

f. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- 3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan bahwa untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan
- 4) Menyusun rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit menular dan tidak menular
- 5) Melaksanakan surveilans epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah
- 6) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit
- 7) Melaksanakan pengamatan penyakit immunisasi dan upaya kesehatan mata

- 8) Melaksanakan pengendalian oprasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan situasi khusus
 - 9) Melaksanakan registrasi akreditasi dan sertifikasi sarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 10) Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa
 - 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
 - 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
- Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Surveilans dan Imunisasi.
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok

membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

5. Bidang Penyelenggaraan Kesehatan

Bidang Penyelenggaraan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka uraian jabatan yaitu:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Membimbing penyusunan normal, standar, prosedur, dan kriteria pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu
- 3) Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program serta lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan
- 4) Memberikan bimbingan teknis dan supervise pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional
- 5) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pemantauan
- 6) Mengoordinasikan perencanaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
- 7) Memberikan rekomendasi izin dan penetapan kelas rumah sakit, izin pelayanan laboratorium dan izin pelayanan radiologi

- 8) Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan haji
 - 9) Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan obstetrikeonatal emergensi dasar dan komprehensif
 - 10) Melaksanakan peningkatan sarana, prasarana dan alat pada pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
 - 12) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan.
- c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu .

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka uraian tugas jabatannya yaitu:

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang sumber daya kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan
- 4) Menyusun rencana tahunan dan lima tahunan upaya kefarmasian
- 5) Mengontrol ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat generik dan obat esensial yang bermutu.
- 6) Meningkatkan pengawasan mutu, khasiat, keamanan produk dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, dan pangan

a. Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Kefarmasian.

b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan.

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



3. Data-data inovasi yang sudah dilakukan pada tahun 2017 sampai 2019

Tabel 4.1 Inovasi Tahun 2017

No	Inovasi Pada Tahun 2017
1	Halo Sehat
2	Kelompok Wanita Tani (KWI) Peduli Ibu Hamil di Desa Kambune
3	Senyumku Sehatku
4	Ketuk Pinu Calon Pendorong Ibu Hamil

Sumber: Dinas Kesehatan Bulukumba

Tabel 4.2 Inovasi Tahun 2018

No	Inovasi Pada Tahun 2018
1	Kemilau Cinta (kelompok wanita tani peduli bumil andalan utama cegah kematian ibu dan neonatal)
2	Kopi Tawar (kelompok peduli tanaman obat warga dusun bonto tangga desa salassae kec. Bulukumpa kab. Bulukumba)
3	Pesonaku Dilayah Mapesse (pemberdayaan kader masyarakat, pada kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional layya mapesse lingkungan paricing kelurahan palampang)
4	Pesta Durian (peran serta duta remaja duta anemi)
5	Satu Rasa Cermat (bisa, patuh dan rasional agar bisa menggunakan obat)
6	PSC (Public safety center)

Sumber: Dinas Kesehatan Bulukumba

Tabel 4.3 Inovasi Tahun 2019

No	Inovasi Pada Tahun 2019
1	Senyum Miana (sehat nyaman dan aman dengan miana)
2	Getar Cinta (gerakan tuna rungu cerdas emosional dengan senam otak)
3	Dora Sang Penyelamat Bagi Ibu dan Neonatal di Desa Bialo

Sumber: Dinas Kesehatan Bulukumba

4. Jumlah Pegawai

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

No	Jabatan	Jumlah
1	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	1 orang
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	1 orang
3	Kabid	4 orang
4	Kasubag	3 orang
5	Kasi	11 orang
6	Staf	65 orang
Total		85 orang

B. *Innovation Organization* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Inovasi merupakan konsep yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Tren dari keberhasilan pada masa sekarang merupakan indikasi dari realisasi- realisasi. Inovasi banyak memberikan terhadap organisasi juga kreatifitas .sementara inovasi, baik perorangan maupun organisasi. Dinamika perubahan lingkungan yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan selalu belajar. Inovasi merupakan upaya mempertahankan yang menggambarkan organisasi dalam lingkungan. Inovasi dalam satu organisasi menjadi hal yang penting dilakukan untuk membawa organisasi menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan dan tepat sasaran yang efektif dan efisien. Adanya inovasi organisasi yang diharapkan dapat memecahkan masalah lingkungan dan perubahan lingkungan, persaingan khusus yang ketat dan sumber daya, sumber daya bersaing.

Organisasi menurut rogers adalah suatu sistem yang stabil, yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu, untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengatur jenjang dan pembagian tugas tertentu.(Ibrahim, 1988:129).Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa organisasi inovasi adalah suatu hal yang baru yang berupa apapun yang terjadi di dalam sebuah organisasi baik formal maupun organisasi informal.

Organisasi Inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas, maupun kinerja para karyawan, menciptakan hal-hal baru, dengan adanya inovasi tersebut diharapkan kualitas kinerja dapat meningkat dan unggul yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Pada bab pembahasan akan dijelaskan bagaimana *innovation organization* diukur menggunakan teori Mintzberg yang melihat pola dasar organisasi bagi *agency* yang melakukan inovasi yaitu : 1) *Structure Simple (struktural sederhana)*; 2). *Machine bureaucracy (mesin birokrasi)*; 3).*Professional bureaucracy (birokrasi profesional)*; 4). *Divisionalized form (formulasi pembagian)*; 5). *Adhocracy (adhokrasi)*.

1. Structure Simple

Structure Simple (Struktur Sederhana) yang dimaksud adalah bagaimana struktur yang digunakan selama ini dalam merumuskan atau menjalankan sebuah inovasi, apakah menggunakan struktur sederhana yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana inovasi atau sebaliknya yang menggunakan struktur yang berbelit-belit sehingga memperlambat proses inovasi disatu organisasi. Ada kajian untuk lebih dalam yaitu aturan khusus inovasi, desain, jaminan inovasi.

Tabel 4.5 :Deskripsi Struktur Simple Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.

Informan	Desain	Aturan khusus inovasi	Jaminan inovasi
Wakil Bupati Bulukumba	Program <i>public safety center</i> (PSC)	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program decade aksi keselamatan jalan. Dimana salah satu programnya adalah mengamanatkan untuk membentuk Program <i>public safety center</i> (PSC) di setiap Kabupaten dan Kota	Memberikan bantuan sarana. Memberikan bantuan dana.
Pelaksana Inovasi (Pak Ihwan)	Program <i>public safety center</i> (PSC)	Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2018 tentang pembuatan Program <i>public safety center</i> (PSC) di Kabupaten Bulukumba	Memberikan bantuan sarana. Memberikan bantuan dana.
Dinas Kesehatan	Melakukan pelatihan-pelatihan emergensi yang tingkat mahirlah agar program tersebut semakin maju.	Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Memberikan bantuan sarana. Memberikan bantuan dana.
Masyarakat (ridwan)	Pelaporan	Tidak tahu	Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa Wakil Bupati Bulukumba mendesain Program *Public safety center* (PSC), Dengan menggunakan aturan

khusus inovasi yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program decade aksi keselamatan jalan. Dimana salah satu programnya adalah mengamankan untuk membentuk Program *Public safety center* (PSC) di setiap Kabupaten dan Kota dan jaminan inovasinya memberikan bantuan sarana, dan memberikan bantuan dana. Rumah sakit umum daerah Bulukumba juga mendesain *Public safety center* (PSC), dan juga memiliki aturan khusus inovasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang pembuatan Program *Public safety center* (PSC), di Kabupaten Bulukumba, dan jaminan inovasinya juga memberikan bantuan sarana dan bantuan dana. Kemudian Dinas Kesehatan mendesain dengan melakukan pelatihan-pelatihan emergensi yang tingkat mahir agar program tersebut semakin maju, kemudian Aturan khusus inovasinya yaitu Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT), dan jaminan inovasinya juga sama dengan pemerintah. Kemudian masyarakatnya disini sebagai pelapor sehingga inovasi tersebut dapat terwujud.

Pada tabel diatas juga merujuk pada *Structure simple* (Struktur sederhana) yang berfokus terhadap aturan khusus yang diterapkan dalam membuat sebuah inovasi, hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat sebuah inovasi diperlukan proses dan struktur yang sederhana agar inovasi yang dibuat bisa berjalan dengan cepat dan baik yang tidak menyulitkan satu pihak dalam proses pelaksanaannya.

Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial DW (Kabid binyankes) yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan sebuah inovasi kami tentunya membuat sebuah struktur sederhana yang mudah dilakukan, agar sebuah inovasi yang

dijalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diarahkan oleh atasan. (Hasil wawancara 7 juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh informan HW (Selaku Sekretaris Dinas Kesehatan), bahwa :

“Tentunya, seharusnya melalui SOP. Secara sederhana, dengan menggunakan struktur sederhana dulu, kemudian dengan berjalannya waktu kita jadikan SOP sebagai jadinya *lining beduin*, artinya inovasi awal dijalankan secara sederhana kemudian dikerjakan maka dari itulah kita mendapatkan banyak pembelajaran yang bisa dilakukan. (Hasil wawancara 9 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan itu menggunakan struktur sederhana agar inovasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian informan HM (Kasubag Umum Dan Kepegawaian) berpendapat bahwa:

“Saya selaku Kasubag umum melihat bahwa setiap ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan atau diusulkan oleh Pemerintah setempat, dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik itu dari segi strukturnya, kerja samanya. Peneliti melihat mereka mampu bekerja sama dengan baik. Dan juga struktur yang di gunakan tidak menyulitkan para pelaksana inovasi tersebut. (Hasil wawancara 10 juli 2019)

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan IH (Ketua Koordinasi Hariani Inovasi) yang mengatakan bahwa :

“Kami sebagai salah satu pelaksana inovasi, ia memang benar inovasi yang diberikan kepada kami untuk dijalankan itu memang betul menggunakan struktur sederhana yang cukup mudah dilaksanakan tidak berbelit-belit, sehingga kami pelaksana inovasi dapat menjalankan tugas dengan baik.” Saya sebagai koordinasi harian dipelaksana inovasi ini melihat para anggota ini bahwa memang mereka mampu mengikuti apa yang sudah diperintahkan, itu artinya struktur-struktur dan SOP yang diberikan tidak menyulitkan mereka. (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Berdasarkan beberapa pernyataan dari informan diatas bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memang banyak melakukan inovasi-inovasi

baik itu ide-ide dari karyawan sendiri maupun usulan dari pemerintah dan laporan-laporan keluhan kesah dari masyarakat sendiri. Dinas Kesehatan mampu memenuhi dan menjalankan inovasi tersebut dengan menggunakan *Structure Simple* (Struktur Sederhana). Berdasarkan hal tersebut pemerintah setempat (Wakil Bupati) juga berpendapat bahwa:

“Ia, kami selaku pemerintah setempat menyarankan kepada para SKPD yang melakukan inovasi itu dengan menggunakan struktur sederhana agar yang melaksanakan dan penerima inovasi tersebut dapat menjalankan dan menerima dengan baik yang tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Tujuannya untuk semakin memaksimalkan kualitas pelayanan, memastikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kita yang lebih transparan, yaa pada akhirnya semakin meningkatkan indeks kekuasaan publiknya masyarakat Bulukumba terhadap pelayanan. (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah seorang masyarakat (RD) berkata bahwa :

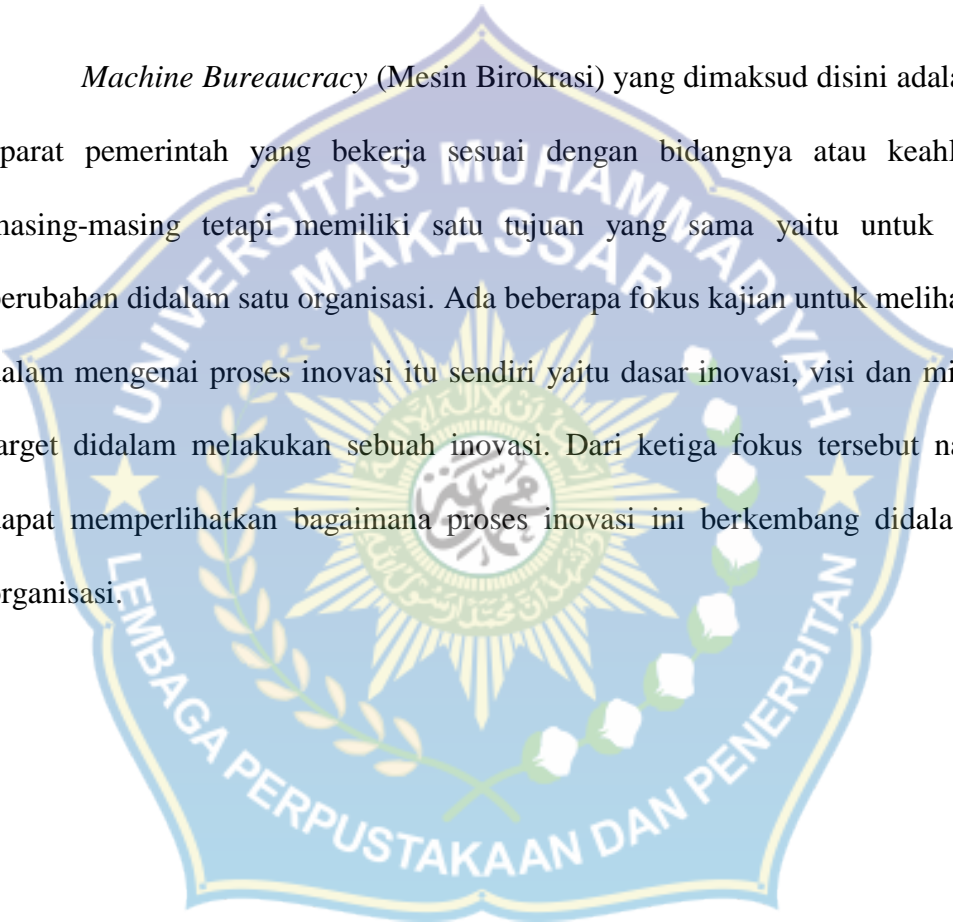
“saya selaku warga atau masyarakat Bulukumba berterimakasih kepada pemerintah setempat atau pun kepada pegawai PSC karena adanya program tersebut saya merasa terbantu dan tertolong dengan adanya program tersebut” (Hasil wawancara 23 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa *Structure Simple* (Struktur Sederhana) berupa langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah inovasi, *Structure simple* (Struktur sederhana) ini sangat membantu dalam proses jalanya sebuah inovasi karena tidak menyulitkan dan tidak berbelit-belit sehingga proses inovasi dapat berjalan dengan cepat dan lancar dan memberikan manfaat. Hal tersebut sesuai fakta yang ada dilapangan dimana laporan yang diterima dari Dinas Kesehatan, pelaksana inovasi dan pemerintah setempat juga mendukung penuh dengan *Structure simple* (Struktur sederhana) yang dilakukan dalam menjalankan inovasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil observasi langsung saya bahwa memang di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memang menggunakan struktur sederhana karena saya melihat sendiri struktur dan langkah yang mereka lalui saat melakukan sebuah inovasi.

2. *Machine Bureaucracy* (Mesin Birokrasi)

Machine Bureaucracy (Mesin Birokrasi) yang dimaksud disini adalah para aparat pemerintah yang bekerja sesuai dengan bidangnya atau keahliannya masing-masing tetapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk sebuah perubahan didalam satu organisasi. Ada beberapa fokus kajian untuk melihat lebih dalam mengenai proses inovasi itu sendiri yaitu dasar inovasi, visi dan misi, dan target didalam melakukan sebuah inovasi. Dari ketiga fokus tersebut nantinya dapat memperlihatkan bagaimana proses inovasi ini berkembang didalam satu organisasi.



Tabel 4.6 Deskripsi Proses Berdasarkan Aktifitas dan Strategi dalam Inovasi Organisasi di Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.

Informan	Dasar inovasi	Visi dan Misi	Target
Wakil Bupati Bulukumba	Peraturan menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang pelayanan publik	-Berorientasi pada hasil -Bermanfaat -Berkelanjutan	-Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat -Meningkatkan kesehatan emergensi
Pelaksana Inovasi (Pak Ihwan)	Program <i>one agency one innovation</i>	-Mudah diterapkan -Membuat para anggota lebih profesional	-Memaksimalkan kualitas pelayanan -Memastikan kualitas kelembagaan pemerintah
Dinas Kesehatan	Program <i>one agency one innovation</i>	-Mengembangkan ide-ide para pegawai -Menghargai masukan-masukan	-Ingin melihat kabupaten bulukumba semakin berkembang -Semua inovasi yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat
Masyarakat (jumaping)	Kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	-Memudahkan -Dapat diterima masyarakat -Bermanfaat	-Agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan pelayanan

Pada tabel *Machine bureaucracy* diatas dapat kita lihat bahwa Wakil Bupati Bulukumba memiliki dasar inovasi dalam pelaksanaan program *one agency one innovation* yaitu Peraturan menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang pelayanan publik, juga memiliki visi dan misi yaitu Berorientasi pada hasil, Bermanfaat, Berkelanjutan. Dan memiliki target khusus yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Meningkatkan kesehatan emergensi. Kemudian

rumah sakit umum daerah Bulukumba juga memiliki dasar inovasi yaitu Program *one agency one innovation*, visi misinya untuk melihat keberhasilan program tersebut yaitu mudah diterapkan, membuat para anggota lebih professional dan pastinya ada target yang ingin dicapai yaitu memaksimalkan kualitas pelayanan, dan memastikan kualitas kelembagaan pemerintah. Pada Dinas Kesehatan sendiri dasar inovasinya yaitu Program *one agency one innovation* dan visi misinya yaitu mengembangkan ide-ide para karyawan dan menghargai masukan-masukan, kemudian target yang ingin dicapainya yaitu Ingin melihat Kabupaten Bulukumba semakin berkembang, dan Semua inovasi yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa *Machine Bureaucracy* (Mesin Birokrasi) didalam organisasi inovasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya mesin birokrasi inovasi yang dijalankan dengan mudah dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat. Hal ini didukung oleh pernyataan informan dengan inisial TS (wakil bupati) mengatakan bahwa :

“Saya selaku wakil dari pemerintah setempat, yaa... kita sebenarnya berharap, mendorong semua SKPD dan para karyawan didalamnya .agar mereka mampu mempresentasikan inovasi-inovasi apa saja yang mereka lakukan dan kita coba uji apakah inovasi yang dilakukan, apakah memberikan manfaat dan kemanfaatan untuk masyarakat kita dan kemudian juga apakah inovasi itu lebih efektif dalam proses pelayanan karena jangan sampai inovasi yang dilakukan malah semakin mempersulit penyelenggaraan pemerintahan kita” (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Hal tersebut dijawab oleh Dinas Kesehatan selaku salah satu sumber inovasi-inovasi yang telah dijalankan, yaitu oleh informan DW (kabid binyankes) bahwa :

“Ia, Dalam pelaksanaan inovasi-inovasi ini tentunya dengan semangat para karyawan dan teman-teman, dan masukan-masukan dari pemerintah sendiri yang sangat membantu kami, sehingga setiap inovasi yang kami jalankan dapat terlaksana dengan baik, dan kami mampu mempertanggung jawabkan.saya sebagai Kabid Binyankes merasa senang melihat para karyawan-karyawan dan teman-teman dapat terlibat dan bekerja secara sama-sama didalam menyukseskan inovasi-inovasi baru” (Hasil wawancara 7 juli 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan diatas bahwa para karyawan atau aparat mampu bekerja sama, hal tersebut sesuai observasi yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan dari wawancara diatas, hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh informan HW (Sekretaris Dinas Kesehatan) bahwa:

“Yaaa yang selama ini saya lihat ssiiii, mereka mampu bekerja sama didalam melaksanakan tugas yang terkait dengan bidangnya masing-masing, dan mereka mampu bekerja secara sungguh-sungguh karena adanya target-target yang ingin dicapainya” (Hasil wawancara 9 agustus 2019)

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan informan IH (Ketua Koordinasi Harian Pelaksana Inovasi) bahwa:

“Ia kalo berbicara tentang mesin birokrasinya artinyakan bagaimana pelaksan dan para aparat mampu bekerja sama, begitukan... yaa kami sebagai pelaksana sudah jelas kami bekerja sama sama didalam melakukan inovasi ini, to disini sudah ada jadwal dan sif masing-masing, itu artinya kita harus dong..melakukan tugas sesuai apa yang semestinya dilakukan, dan kami tidak lupa dengan peraturan-peraturan awal yang telah dibuat. Nahh saya selaku ketua koordinator harian sesekali jika dilokasi trus ada yang bisa saya bantu, saya juga bisa turung langsung kelapangan. Kan segala sesuat yang berat jika dilakukan dengan sama-sama insyaallah semuakan ringan” (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Hal tersebut senada dengan informan DN (Pelaksana Salah Satu Inovasi) bahwa:

“Kan ini memang pekerjaan kami, yaa kami harus dong, dan mau tidak mau kami harus bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Kan sukses tidaknya sebuah inovasi ataupun tugas kami too nantinya kami sendiri yang akan rasakan dampaknya dan kami memang mempunya sif atau

jadwal masing-masing tetapi jika salah satu diantara kami memiliki urusan yang betul-betul tidak bisa ditunda, kami berkomunikasi untuk tukaran jadwal piket, kan itu salah satu bentuk kerja sama kami” (Hasil wawancara 23 juli 2019)

Machine Bureaucracy (Mesin Birokrasi) adalah kerja sama yang dilakukan para karyawan atau pun aparat setempat. Dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba juga menggunakan *Machine Bureaucracy* didalam melaksanakana tugas atau menjalankan sebuah inovasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas juga mendapatkan respon baik dari salah satu masyarakat yang telah merasakan dari adanya salah satu inovasi dipemerintahan Kabupaten Bulukumba yaitu JP (Masyarakat) :

“Yaaa saya sangat bersyukur dengan adanya inovasi dibidang kesehatan, karena adanya inovasi ini saya sebagai masyarakat biasa sangat-sangat berterima kasih untuk semua yang sudah membantu. *Apana ia' kasi tau mabela bola ku pole dikotae na pa mabela rumah sakiee. Aladeceng engka diaseng talipong (telpon) mata'lipong mi tau ee na engka jemput ki anaku kasi langsung ditiwi lao dirumah sakit.*” (Hasil wawancara 23 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Machine Bureaucracy* (Mesin Birokrasi) didalam pelaksanaan inovasi sangat diperlukan, karena didalam melakukan sebuah inovasi tidak bisa dilakukan dengan sendiri, atau tanpa masukan-masukan dari rekan kerja.

3. *Professiona Bureaucracy* (Birokrasi Professional)

Professiona Bureaucracy (Birokrasi Professional) yang dimaksud disini adalah para pembuat inovasi maupun pelaksana inovasi, mampu bekerja secara professional, yang betul-betul bekerja dengan tekun yang tidak mementingkan kepribadiannya. Agar inovasi yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.

Tabel. 4.7 Deskripsi Propesional Birokrasi Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

Informan	Peningkatan keahlian pegawai	Kinerja pegawai
Wakil Bupati Bulukumba	-Sosialisasi -Pembinaan langsung ditempat kerja -Pelatihan-pelatihan	-Ada target yang harus dicapai
Pelaksana Inovasi (Pak Ihwan)	-Melakukan diklat-diklat emergensi	-Tingkat kedisiplinannya sudah meningkat
Dinas kesehatan	-Menyediakan ruang dan dana pelaksanaan pelatihan	-Kinerja pegawai dan disiplin pegawai sangat signifikan
Masyarakat (jumaping)	-Sosialisasi menggunakan pelatihan-prlatihan serta ada perearan berita dimedia social	-Kinerja lebih teratur

Pada tabel diatas untuk melihat *Professiona Bureaucracy* dalam *Innovation Organization*. Bupati dan Wakil bupati Bulukumba melihat dengan menggunakan sub indikator yaitu peningkatan keahlian pegawa yakni sosialisasi, pembinaan langsung, dan pelatihan-pelatihan, dan melihat dari segi kinerja pegawai yaitu adanya target yang harus dicapai. Kemudian rumah sakit umum

daerah Kabupaten bulukumba juga melihat pada bagian peningkatan keahlian pegawainya yaitu dengan melakukan diklat-diklat, kemudian kinerjanya yaitu tingkat kedisiplinannya sudah meningkat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba juga melihat peningkatan keahlian pegawainya yakni menyediakan ruang dan dana pelaksanaan pelatihan.

Pada tabel diatas berfokus pada *Professiona Bureaucracy* (Birokrasi Professional) yaitu para aparat mampu bekerja secara professional karena dengan arahan dari atasan dan pemerintah tersebut agar inovasi dapat berjalan dengan baik, dan mereka ditempatkan sesuai bidangnya masing-masing agar mereka juga dapat lebih mendalami keahliannya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan TS (Wakil Bupati) bahwa :

“Saya selalu menyarankan setiap Instansi bahwasannya sebelum menerima pegawai honorer harus dilihat dulu dari lulusannya, pengalaman-pengalaman kerjanya, keahliannya. Agar nantinya dalam melakukan tugasnya dapat bekerja secara professional atau bekerja sesuai kemampuannya dan keahliannya” (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Berikut ada pernyataan dari informan yang berinisial HW (Sekretaris Dinas Kesehtan) bahwa:

“Saya kira inovasi mereka yang kadang muncul, itu mereka sesuai dengan propesinya, propesi masing-masing misalnya seorang perawat inovasi yang ada maka dikembangkan didunia keperawatan, jadi masing-masing berinovsi sesuai lingkup pekerjaanya kemudian tentunya inovasi yang muncul ini yaaaa, bagaimana pekrjanya evektif dan efisien” (Hasil wawancara 9 agustus 2019)

Dari hasil wawancara diatas hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh informan DW (Kabid Binyankes) bahwa :

“Alhamdulillah sampai sejauh ini mereka para karyawan mampu bekerja secara professional dan mampu menyelesaikan apa yang diperintahkan yang sesuai bidangnya masing-masing, maka dari itu setiap ada inovasi

yang arahkan kedinas kesehatan oleh pemerintah setempat kita mampu menyelesaikan dengan baik” (Hasil wawancara 7 juli 2019).

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. *Professiona bureaucracy* (Birokrasi Professional) bahwa para karyawan pada Dinas Kesehatan sangat mematuhi aturan yang ada, mereka mampu bekerja secara professional. Hal tersebut sesuai fakta yang didapat dilapangan. Dan hal tersebut didukung dengan apa yang disampaikan oleh informan HM (Kasubag Umum) mengatakan bahwa:

“Yaa sudah jelas mereka bekerja secara professional karena mereka ditempatkan pada bidang atau keahliannya masing-masing, kan kami di Dinas Kesehatan ini menerima karyawan yang betul-betul lulusan dari dunia kesehatan. Agar mereka nantinya didalam pelaksanaan tugasnya dapat melaksanakan dengan baik, yaa artinya bekerja secara professional lahh” (Hasil wawancara 10 juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa semua karyawan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba mampu bekerja secara professional.

Kemudian hasil wawancara ini senada dengan informan IH (Ketua Koordinasi Harian Pelaksana Inovasi), mengatakan bahwa:

“Ya, seperti yang saya bilang diawal bahwa yang dipelaksanan inovasi ini adalah betul-betul petugas-petugas yang masuk dalam seleksi inovasi PSC ini adalah orang-orang yang memang punya fisik perkemansiaan disini tidak ada tenaga yang misalnya saya arahkan untuk coba kerjakan ini tidak ada satupun yang bertaya berapa uangnya pak. Murni yang mana mau diselsaikan. Itulah yang mendorong semangat saya ornag-orang yang bekerja di PSC ini krna lebih mengembangkan sisi perkemansiaan dari pada aspek-aspek yang lain, itu yang membuat kami bersemangat. Mereka bekerja secara professional” (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu karyawan pelaksana inovasi LS berpendapat bahwa:

“Ini memang tuntutan dari atasan dan aturan langsung dari kantor yang memang harus bekerja secara *professional*, kami sebagai pelaksana sekaligus karyawan ya harus mampu bekerja secara *professional*. Tetapi ini merupakan hal yang baik dan berdampak positif baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, ya untuk masyarakat dapat menikmati dari hasil kerja kami misalnya kami ini bekerja disalah satu inovasi yaitu *Public Safety Center (PSC)*, tugas kami ini misalnya, ada kasus- kasus tengah malam yang butuh bantuan darurat mereka pun bingung mau menelpon siapa, saya butuh bantuan armada mau dipindahkan dari rumah ini di angkut ke sarana pelayanan untuk menamatkan pertolongan atau ada petugas yang bisa hadir ditempat untuk melakukan penanganan secepatnya. Dan inovasi ini banyak mendapatkan respon baik dari masyarakat dan Bapak Bupati sendiri. (Hasil wawancara 23 juli 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa *Professiona Bureaucracy* (Birokrasi Professional) memang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba karena para karyawannya ditempatkan pada porsinya masing-masing atau bekerja sesuai apa keahliannya, dan para karyawan Dinas Kesehatan mampu bekerja dengan tidak mencampur adukkan dengan urusan yang diluar dari apa pekerjaan mereka. Karena mereka mengutamakan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba salah satu misinya yaitu Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, dan kesehatan.

4. *Divisionalized Form* (Formulasi Pembagian)

Divisionalized Form (Formulasi Pembagian) berupa standar yang digunakan dalam menjalankan suatu inovasi organisasi, agar inovasi tersebut berjalan dengan lancar. Untuk mendalami *Divisionalized Form* (Formulasi Pembagian) ada kajian fokusnya yaitu standar pelayanan dan aturan yang digunakan dalam satu sistem inovasi.

Tabel 4.8 Deskripsi *Divisional* Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

Informan	Standar pelayanan	Aturan
Wakil Bupati Bulukumba	Mebutuhkan kerjasama yang baik, yang professional, cepat tanggap	Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah
Pelaksana inovasi (pak ihwan)	Mematuhi aturan yang telah dibuat dari dinas kesehatan sendiri	-Instruksi presiden nomor 4 tahun 2013 tentang program decade aksi keselamatan jalan. (salah satu programnya mengamanahkan untuk membentuk public safety center PSC disetiap kabupaten dan kota) -Permenkes RI Nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulanggawat darurat terpadu (berita Negara RI tahun 2016 nomor 803) -Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2018 tentang pembentukan Public Safety Center (psc) di Kabupaten Bulukumba.
Dinas kesehatan	Mempercepat rantai-rantai pelayanan inovasi yang dibuat itu harus efektif dan efisien	-Peraturan menteri dalam negeri Nomor 36 tahun 2012 tentang sistem inovasi daerah
Masyarakat (ridwan)	Kebutuhan kami terpenuhi	Tidak ada

Wakil Bupati Bulukumba melihat *Divisionalized Form* pada *Innovation Organization* melihat dari standar pelayanannya yaitu membutuhkan kerjasama yang baik, yang professional dan cepat tanggap, dan memiliki aturan yaitu Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Kemudian Rumah sakit umum daerah Bulukumba melihat standarnya dengan mematuhi aturan yang telah dibuat dari Dinas Kesehatan sendiri, kemudian aturannya yaitu Instruksi presiden nomor 4 tahun 2013 tentang program decade aksi keselamatan jalan. (salah satu programnya mengamanahkan untuk membentuk public safety center PSC disetiap kabupaten dan kota) dan Dinas

Kesehatan melihat standar pelayanannya dengan mempercepat rantai-rantai pelayanan inovasi yang dibuat dengan harus efektif dan efisien dan ataurannya yaitu Peraturan menteri dalam negeri Nomor 36 tahun 2012 tentang sistem inovasi daerah. Kemudian masyarakat berkata kebutuhan kami terpenuhi.

Pada tabel diatas merujuk pada *Divisionalized Form* (Formulasi Pembagian) yaitu setiap inovasi yang dilakukan harus berlandas pada peraturan pemerintah dan standar-standar pelayanan. Agar inovasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan respon baik dari pemerintah setempat. Berikut hasil wawancara terkait *Divisionalized Form* (Formulasi Pembagian) dalam inovasi organisasi. Adapun hasil wawancara dengan informan TS (Pak Wakil Bupati Bulukumba) terkait dengan *divisionalized form* didalam inovasi organisasi bahwa :

“Yaa kami selaku pemerintahan kabupaten bulukumba akan selalu mendukung setiap inovasi-inovasi yang dibuat oleh SKPD, dengan catatan tidak merugikan masyarakat, melaikan membantu instansi-instansi lain maupun membantu pembangunan, dan pelayanan masyarakat Bulukumba sendiri, Dan tentunya setiap inovasi yang dilakukan oleh instansi kami harus tau dulu manfaat, target dan dampaknya apa, kalau memang dampak, target, dan manfaatnya baik yang tidak menimbulkan masalah-maslah baru yaa kami dukung dan terima kemudian kami rapatkan dan buat aturan-aturan. (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Adapun wawancara yang terkatit tentang *Divisionalized Form* didalam inovasi organisasi, wawancara dengan informan HW (Sekretaris Dinas Kesehatan) bahwa :

“Saya kira segala hal itu ada aturan yang menaungi nya dan tentunya inovasi tidak sekedar inovasi. Yaa harus ada target, agar bisa ditindak lanjuti, diimplementasikan supaya betul-betul ada daya ungitnya kemasyarakat dan standar outputnya yaa tentunya mendapatkan semacam penguatan dari shakholder yang ada, mendapatkan semacam saran dan masukan supaya inovasi yang ada tentunya lebih baik, lebih berguna, dan

juga mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat inovasi itu lebih berguna. (Hasil wawancara 9 agustus 2019)

Kemudian informan IH (Ketua Koordinasi Pelaksana Inovasi PSC) juga berpendapat bahwa:

“Saya selaku ketua koordinasi harian di salah satu inovasi yang dibuat dari Dinas Kesehatan yaitu PSC bahwasagnya dalam menjalankan inovasi ini tentunya ada target yang kami ingin capai dan Alhamdulillah trget tersebut sudah kami dapatkan dan pastinya ada atauran yang menaunginya yaitu Instruksi presiden No 4 tahun 2013 tentang program decade aksi keselamatan jalan, dimana salah satu programnya adalah mengamankan untuk membentuk *Public Safety Center* (PSC) di setiap Kabupaten/Kota. Dan Praturan Bupati No 11 Tahun 2018 tentang pembentukan *Public Safety Center* (PSC) di Kupaten Bulukumba. (Hasil Wawancara 22 juli 2019)

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa *Divisionalized Form* (Formulasi Pembagian) itu memang dibutuhkan didalam sebuah inovasi, karena jika tidak ada target dan aturan yang menaunginya pasti kinerja karyawan tidak bisa dikontrol karena tidak adanya target yang ingin dicapai, dan tidak adanya aturan-aturan yang ingin patuhi. Hal tersebut sesuai fakta yang didapat dilapangan.

5. Adhocracy

Adhocracy yang dimaksud disini yaitu apakah ada lembaga atau organisasi khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menyukseskan satu inovasi yang dilakukan. Untuk mengkaji lebih dalam berfokus pada manfaat, dan kerja sama pengembangan inovasi.

Tabel 4.9 Deskripsi *Adhocracy* Berdasarkan Inovasi Organisasi Dinas Kesehatan dan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

Informan	Manfaat	Kerja sama pengembangan inovasi
Wakil Bupati Bulukumba	Pemerintah merasa senang dan bangga	Tidak ada kerja sama antra lembaga lain
Pelaksana inovasi (pak ihwan)	Meningkatkan rasa kepuasan kepada pemerintah sendiri dan dinas-dinas yang terkait	Tidak ada kerja sama antra lembaga lain
Dinas kesehatan	Bertanggung jawab, dan melatih diri	Tidak ada kerja sama antra lembaga lain
Masyarakat (ridwan)	Merasa aman dan terpenuhi	Tidak ada

Pada tabel diatas Wakil Bupati Bulukumba serta Dinas-dinas yang terkait yang melakukan inovasi-inovasi memang *Adhocracy* tidak dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, karena pemerintah berharap bahwa semua instansi yang melakukan inovasi mampu mempertanggung jawab inovasinya tersebut. Dari situlah pemerintah mendapatkan manfaatnya yakni pemerintah merasa senang dan bangga, rumah sakit umum daerah Bulukumba merasa meningkatkan rasa kepuasan kepada pemerintah sendiri dan Dinas-dinas yang terkait, Dinas kesehatan bertanggung jawab dan melatih diri.

Pada tabel diatas berfokus pada *Adhocracy* yakni disini tidak ada lembaga khusus yang dibentuk pemerintah sendiri maupun dinas kesehatan, tetapi disini bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, demi kelancaran satu inovasi

disatu organisasi. Hal tersebut senada dengan apa yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dengan inisial TS (Wakil Bupati Bulukumba) bahwa :

“Secara spesifik tidak ada, karena setiap SKPD itu harus bertanggung jawab untuk melahirkan inovasi-inovasi, saya sebagai wakil bupati selalu meminta bahwa anda harus membuat inovasi yang tujuannya yang seperti saya sampaikan tadi. Rutin kita sampaikan bahwa apa inovasi-inovasi yang sudah dilahirkan oleh masing-masing SKPD dan bagaimana efektifitas dan efisiensi dari masing-masing SKPD dalam menjalankan inovasi itu” . (Hasil wawancara 28 agustus 2019)

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan informan dengan inisial HW (sekretaris dinas kesehatan) bahwa:

“selama ini belum ada, pernah ada dari STIELAN tapi untuk lingkup dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas yaa mereka masih berinovasi sendiri-sendiri, klo di dinas kesehatan biasanya inovasi muncul itu dibawa kepermukaan ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan penilaian tenaga teladang , jadi inovasi itulah kadang dimunculkan melalui sebuah makalah kemudian yaaa dilinai tingkat kabupaten, tingkat provinsi” (Hasil wawancara 9 agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan IH (ketua koordinasi dari pelaksana inovasi)

“Yaa memang kami disini tidak ada kerjasama antara lembaga atau organisasi lain, karena fasilitas yang diberikan kepada kami sudah cukup, dan apabila kami memiliki kekurangan kami bisa langsung membuat laporan ke Dinas Kesehatan” (Hasil wawancara 22 juli 2019)

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa *Adhocracy* yang dilakukan untuk inovasi di Kabupaten Bulukumba memang tidak ada, karena pemerintah berharap kepada SKPD yang melakukan inovasi dapat bertanggung jawab sendiri dari hasil inovasi yang mereka buat. Agar SKPD atau dinas yang melakukan inovasi bisa mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga lain

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya peneliti ini melihat bagaimana *Innovation Organisasi* di Pemerintahan Kabupaten Bulukumba khususnya di Dinas Kesehatan. Model evaluasi yang digunakan sebagai berikut:

1. *Structure simple*

Structure simple (Struktur sederhana) berupa langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah inovasi, *Structure simple* (Struktur sederhana) ini sangat membantu dalam proses jalanya sebuah inovasi karena tidak menyulitkan dan tidak berbelit-belit sehingga proses inovasi dapat berjalan dengan cepat dan lancar dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai fakta yang ada dilapangan dimana laporan yang diterima dari Dinas Kesehatan, pelaksana inovasi dan pemerintah setempat juga mendukung penuh dengan *Structure simple* (Struktur sederhana) yang dilakukan dalam menjalankan inovasi.

2. *Machine bureaucracy*

Machine bureaucracy (mesin birokrasi) didalam organisasi inovasi ternyata mesin birokrasi sangat dibutuhkan karena dalam proses pelaksanaan inovasi sangat di butuhkan yang namanya kerja sama baik itu karyawan sendiri maupun aparat-aparat yang terkait sehingga inovasi tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan dasar-dasar inovasi Peraturan menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang pelayanan public yang telah dibuat dan dapat mencapai

target-target yang ingin dicapai, melalui visi dan misi. sehingga Program *one agency one innovation* tersebut berjalan dengan cepat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. *Professiona bureaucracy*

Professiona bureaucracy (birokrasi professional) ini juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan inovasi, dan para karyawan ditempatkan pada posisinya masing-masing sehingga inovasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan mampu bekerja secara professional. Dengan *Professiona bureaucracy* juga peningkatan keahlian pegawai dilakukan seperti sosialisai, pembinaan ditempat kerja, dan pelatihan-pelatihan. Dengan hal tersebut tersebut kinerja pegawai juga meningkat karena adanya target yang harus dicapai, tingkat kedisiplinannya juga sudah meningkat. Oleh karena itu *Professiona bureaucracy* sangat dibutuhkan dalam pelaksana inovasi. pada bagian ini sangat terkait dengan struktur sederhana dan mesin birokrasi para anggota dan karyawan bekerja dengan melihat standar-standar simple, dan bekerja secara professional tidak menerima masukan-masukan dari luar struktur yang telah dibuat. Sehingga inovasi tersebut tidak mengalami hambatan-hambatan dalam proses inovasi dilaksanakan.

4. *Divisionalized form*

Divisionalized form (formulasi pembagian) itu memang dibutuhkan didalam sebuah inovasi, karena jika tidak ada standar pelayanan dan aturan yang memaunginya pasti kinerja karyawan tidak bisa dikontrol. Adapun standar pelayananya yaitu membutuhkan kerjasama yang baik, yang professional,cepat tanggap, mematuhi aturan yang telah dibuat dari Dinas Kesehatan, mempercepat

rantai-rantai pelayanan inovasi yang dibuat agar efektif dan efisien, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan dalam *Divisionalized form* aturannya yaitu Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dan instruksi presiden nomor 4 tahun 2013 tentang program decade aksi keselamatan jalan. (salah satu programnya mengamankan untuk membentuk public safety center PSC disetiap kabupaten dan kota).

5. *Adhocracy*

Adhocracy yang dilakukan untuk inovasi di Kabupaten Bulukumba memang tidak ada, karena pemerintah berharap kepada SKPD yang melakukan inovasi dapat bertanggung jawab sendiri dari hasil inovasi yang mereka buat. Agar SKPD atau Dinas yang melakukan inovasi bisa mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga lain. Tetapi dengan hal tersebut tentunya memiliki manfaat yakni pemerintah merasa senang dan bangga, meningkatkan rasa kepuasan kepada pemerintah sendiri dan dinas-dinas yang terkait, bertanggung jawab dan melatih diri, yang pastinya masyarakat merasa aman dan terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai *Innovative Organization* di pemerintahan Kabupaten Bulukumba, maka penulis menyarankan :

1. Diharapkan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan inovasi agar lebih optimal, meningkatkan dalam hal pemberian apresiasi yaitu pemberian penghargaan materi maupun non materi,

pengakuann, mengikuti diklat sesuai prestasinya serta meningkatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk para pembuat inovasi agar lebih terpacu dalam mengembangkan ide dan pikirannya dalam membuat trombosan-trombosan baru.

2. Diharapkan untuk setiap instansi dengan adanya praturan Bupati bahwa setiap instansi harus membuat satu inovasi dapat senantiasa membuat trombosan-trombosan terbarunya khususnya.
3. Untuk para instansi pembuat inovasi agar kiranya meningkatkan sosialisasi program seperti pemberian pemahaman lebih mendalam mengenai inovasi yang baru dibuat yang sifatnya lebih memudahkan bukan menyusahkan masyarakat.
4. Diharapkan seluruh masyarakat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara lebih meningkatkan antusiasnya dalam mencari informasi terbaru mengenai perkembangan organisasi inovasi, selalu *update* mengenai perkembangan yang ada untuk kepentingan perbaikan pelayanan public yang lebih oprimal dengan adanya berbagai inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Faizal. (2012). *Organisasi inoiaif*. Jakarta
- Basuki, yuyuk dkk. 2018. *Tipologi Inovasi Sektor Publik (Inovasi Program S1-CAKEP)*. di Kabupaten Wajo. Sulawesi Selatan.
- Berkely exsecutif education. 2019 *The Innovative Organization: From Idea Generation to Market Success*.
- Displaces. (2005). *Changing attitudes about change: longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change*. *Organizational behavior journals*, 26 (7), 733-753.
- Florence, sophie. 2018. *Inovasi Pelayanan Publik. Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 6, Nomor 2. Diakses pada hari minggu 24 maret 2019
<https://executive.berkeley.edu/innovative/organization>.
- Lam, A. 2019 *'Innovative organizations: Structure, Learning And Adaptation'*, *Innovation Perspectives For The 21st Century*, Madrid: BBVA, Spain, pp.163-175.
- Lam, Alice. 2004 *Organizational Innovation*. Working paper No. 1: Brunel University Brunel Research in Enterprise, Innovation, Sustainability, and Ethics Uxbridge, West London.
- Lunenburg, F. C. 2012 *Organizational Structure: Mintzberg's framework*. *International Journal Of Scholarly, Academic, Intellectual Diversity*. Sam Houston State University.
- Mahsyar. A. 2011. *Masalah Pelayanan PubliK di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik*. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No. 2*.
- Mintztrberg, Hendry. 1979. *Penyusunan Organisasi: sintesis penelitian*. Universitas Michigan: Prentice-Hall.
- Modanggu, budi kurniawan. 2011. Empat Belas Prinsip “*Good Gavernasce*” versi bappenas slideplayer.info. diakses pada hari sabtu 23 maret 2019 pukul 13.20 wita.
- Muhammad Imanuddin.2016 *One Aagency One Innovation dan Telaah Keilmuannya*. Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokras.
- O'Reilly, C.A., & Tushman, M.L. (2004). *The Ambidextrous Organization*. *Harvard Business Review*, 82(4), 74-83.

- Presiden Teken PP Payung Hukum Terhadap Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2017 <https://setkab.go.id/presiden-teken-pp-payung-hukum-terhadap-inovasi-dalam-penyelenggaraan-pemerintah-daerah>.
- Porras, J.I., & Robertson, P. J. (1992). *Organization development: Theory, Practice, And Research*. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), *Handbook Of Industrial And Organizational Psychology* (2nd ed., Vol. 3, pp. 719-822). Palo Alto, CA: Consulting Psychology Press.
- Rahayuningsih Idha. 2017 *Pengembangan Kreatifitas Dan Inovasi Di Organisasi*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Rogers, E.M. and Shoemaker, F.F., 1971, *Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach*, New York: Feer Press.
- Sartika, Dewi. 2015 *Inovasi Organisasi Dan Kinerja Organisasi : studi kasus pada pusat kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur III lembaga administrasi negara* *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 11. No. (2).
- Schumpeter, JA. (1950). *Capitalism, Sosialism and Democracy* (3rded) New yord. Harper & Row.
- Shalley Christina E. dkk. 2015. *The Oxford Handbook Of Creativity, Innovation And Entrepreneurshi*. New york: Oxford University Press.
- Silent Dreams. 2012. *Inovasi dalam Organisasi*. <http://robymaulana.blogspot.com/2011/02/inovasi-dalam-organisasi.html>.
- Square, Botani. 2018. IPB *Innovation & Entrepreneurship Expo*. dik.ipb.ac.id. Di akses pada hari minggu tanggal 24 maret 2019 pukul 14.40 wita.
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*, CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Abdul Aziz. 2015. *Kepemimpinan Dalam Perubahan Dan Perkembangan Organisasi*. *Jurnal eklektika*, volume 3 nomor 1. Universitas Pendidikan Indonesia.

L

A

M

P

I

R

A

N





Nomor : 1452/FSP/A.1-VIII/VI/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Lidia Fariani
Stambuk : 10561 05223 15
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kabupaten Bulukumba
Judul Skripsi : **“Innovative Organisation pada Program One Agency One Innovation di Pemerintahan Kabupaten Bulukumba”**

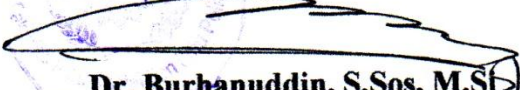
Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 19 Juni 2019

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No.4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 01 Juli 2019

Nomor : 070/560/Kesbangpol/VII/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab.Bulukumba
di-
Jalan Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Unismuh Makassar Nomor : 1942/05/C.4VIII/V/1440/2019 tanggal 19 Juni 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : LIDIA FARIANI
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 15 - 12 - 1996
No.Pokok : 10561 05223 15
Program Studi/Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi Unismuh Makassar
Alamat : Jl. Emmy Saelan Makassar
Hp. 085 825 228 761

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

“ INNOVATIVE ORGANIZATION PADA PROGRAM ONE AGENCY ONE INNOVATION DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BULUKUMBA ”.

Selama : Tmt 22 Juni s/d 22 Agustus 2019
Pengikut/Ang. Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Izin Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.



KEPADA KANTOR

AHMAD ARFAN, S.IP, MT

Pangkat : Pembina Tk. I

:19721212 199202 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab.Bulukumba
3. Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makassar
4. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Suatan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1950/05/C.4-VIII/V/1440/2019

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Syawal 1440 H

20 June 2019 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan
di -

Bulukumba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1454/FSP/A.1-VIII/VI/1440 H/2019 M tanggal 20 Juni 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **LIDYA FARIANI**

No. Stambuk : **10561 05523 15**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Inovative Organization Pada Program One Agency One innovation Di Pemerintahan Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Juni 2019 s/d 22 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 01 Juli 2019

Nomor : 0396/DPMPTSP/VII/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/560/Kesbangpol/VII/2018 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini :

Nama : **LIDIA FARIANI**
Nomor Pokok : **10561 05223 15**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
Institusi : **UNISMUH MAKASSAR**
Alamat : **JL. EMMY SAELAN MAKASSAR**

Bermaksud Melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul "**INNOVATIVE ORGANIZATION PADA PROGRAM ONE AGENCY ONE INNOVATION DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BULUKUMBA**" yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juni s/d 22 Agustus 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian / pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/ pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Sutomo No.2 Telp. 0413-81080 Fax. 0413-84646 KodePos 92511

REKOMENDASI

Nomor : 858/07.04/1.1/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan surat permohonan tanggal 1 Juli 2019 dengan ini memberikan rekomendasi :

Nama : Darmawati, SKM, M.Kes
Nip : 196807041989032018
Pangkat/Gol : Penata Tk I/III.d
Jabatan : Kabid Pelayanan Kesehatan
Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lidia Fariani
NIM : 10561 05223 15
Alamat : Jl. Emmy Saelan Makassar
Judul : **Innovative Organization Pada Program One Agency One Innovation Di Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.**

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bulukumba dalam penyusunan Skripsi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 01 Juli 2019

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan


Darmawati, SKM, M.Kes
NIP: 196807041989032018

Wawancara Dengan Bapak Wakil Bupati Bulukumba



Foto Bersama Bapak Wakil Bupati Bulukumba



Wawancara dengan informan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba



Wawancara dengan informan Kabid Binyankes (Bina pelayanan kesehatan) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba



Wawancara dengan Ketua Koordinasi Harian Pelaksana Inovasi Kabupaten Bulukumba



Salah satu pelaksanaan inovasi



RIWAYAT HIDUP



LIDYA FARIANI, Dilahirkan di Kabupaten Bulukumba pada hari senin tanggal 15 Desember 1996. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan H.Halim dan Hj.Nur Laela, memiliki saudara perempuan yang bernama Nur Linda.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD 28 Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikannya di Mts Negeri 1 Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba lulus pada tahun 2011 dan kemudian melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya di SMA Negeri 2 Bulukumba dengan mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial dan lulus pada tahun 2014 pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi swasta. Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti pengkaderan yang diadakan oleh organisasi jurusan Administrasi Negara yaitu HUMANIERA. Penulis mengikuti Darul Arkam Dasar (DAD) Muhammadiyah.